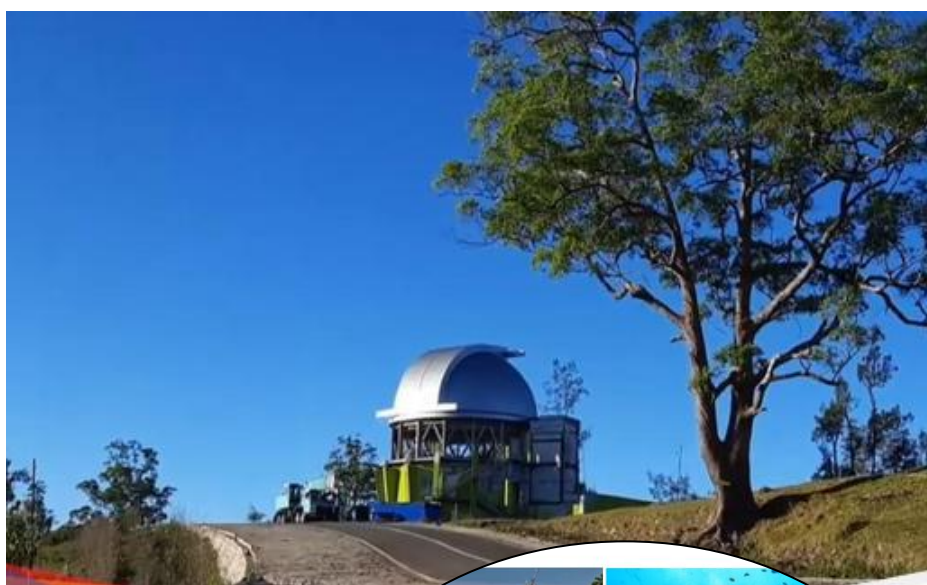




Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Frans Seda Nomor 72, Kupang 85227

Telp/Fax: (0380) 826384

email: parekraf@nttprov.go.id

website: www.parekrafntt.id

Kolaboratif
Inovatif
Dalam Pengembangan
Pariwisata Berkelanjutan

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan Umum, strategi dan Prioritas dalam Pembangunan Provinsi NTT yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah daerah NTT selama 3 (tiga) tahun sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) NTT 2018-2023. RKT ini sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Adapun dasar pembangunan dan penyusunan RKT ini adalah

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cata Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
18. Peraturan Gubernur NTT Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Kinerja ini selanjutnya menjadi acuan kerja dan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk bobot Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

2. Tupoksi dan Struktur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada unsur pelaksana bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas dan fungsi yang diberikan sebagai berikut :

- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Menyelenggarakan fungsi
 - Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

b. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 dan Pergub NTT Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara struktur memiliki organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretaris, yang terdiri atas :
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
- Bidang Destinasi Pariwisata
- Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

3. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berjumlah 79 orang dan didukung tenaga kontrak sebanyak 31 orang. Gambaran selanjutnya dapat dilihat pada beberapa tabel sebagai berikut :

Tabel. 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang Keadaan 31 Desember 2023

NO	GOL/RUANG	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1	Gol. IV/e	-	-	-	
	Gol. IV/d	-	-	-	
	Gol. IV/c	1	-	1	
	Gol. IV/b	5	-	5	
	Gol. IV/a	1	1	2	
	Jumlah Gol IV	7	1	8	10,13 %
2	Gol. III/d	10	12	22	
	Gol. III/c	6	3	9	
	Gol. III/b	5	7	12	
	Gol. III/a	8	7	15	
	Jumlah Gol. III	29	29	58	73,42 %
3	Gol. II/d	2	2	4	
	Gol. II/c	4	-	4	
	Gol. II/b	4	-	4	
	Gol. II/a	1	-	1	
	Jumlah Gol. II	11	2	13	16,45 %
4	Gol. I/d	-	-	-	
	Gol. I/c	-	-	-	
	Gol. I/b	-	-	-	
	Gol. I/a	-	-	-	
	Jumlah Gol. I	0	0	0	0%
	TOTAL (1+2+3+4)	47	32	79	100%

Dari tampilan tabel di atas terlihat bahwa komposisi PNS Pria lebih banyak (47 org = 59,49 %) bila dibandingkan dengan PNS Wanita (32 org = 40,51 %).

Tabel. 5. Komposisi PNS berdasarkan Agama Keadaan 31 Desember 2023

NO	AGAMA	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Protestan	27	22	49	62,02 %
2.	Katholik	17	9	26	32,91 %
3.	Islam	3	1	4	5,07 %
4.	Hindu	-	-	-	0 %
5.	Budha	-	-	-	0 %
	TOTAL	47	32	79	100%

Tabel. 6. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Keadaan 31 Desember 2023

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH JABATAN	JABATAN TERISI			KET
			L	P	JLH	
1.	Eselon II	1	1	-	1	
2.	Eselon III	5	5	-	5	
3.	Eselon IV	1	1	-	1	
4.	Pejabat Fungsional Tertentu	10	5	5	10	
	TOTAL	17	12	5	17	

Tabel. 7 Komposisi PNS pada Bidang/Sekretariat Keadaan 31 Desember 2023

NO	SUBDIN/BAGIAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Sekretariat	23	8	31	39,24 %
2.	Bidang Destinasi Pariwisata	8	5	13	16,45 %
3.	Bidang Pemasaran Pariwisata	3	6	9	11,39 %
4.	Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8	7	15	18,99%
5.	Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	6	11	13,93%
	TOTAL	47	32	79	100%

Tabel. 8 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2023

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	S-3	1	-	1	1,27 %
2.	S-2	9	4	13	16,45 %
3.	S-1/D-IV	21	16	37	46,83 %
4.	Diploma/Sarjana Muda	5	9	14	17,72 %
5.	SLTA	9	3	12	15,19 %
6.	SLTP	2	-	2	2,53 %
7.	SD	1	-	1	1,22%
	TOTAL	47	32	79	100%

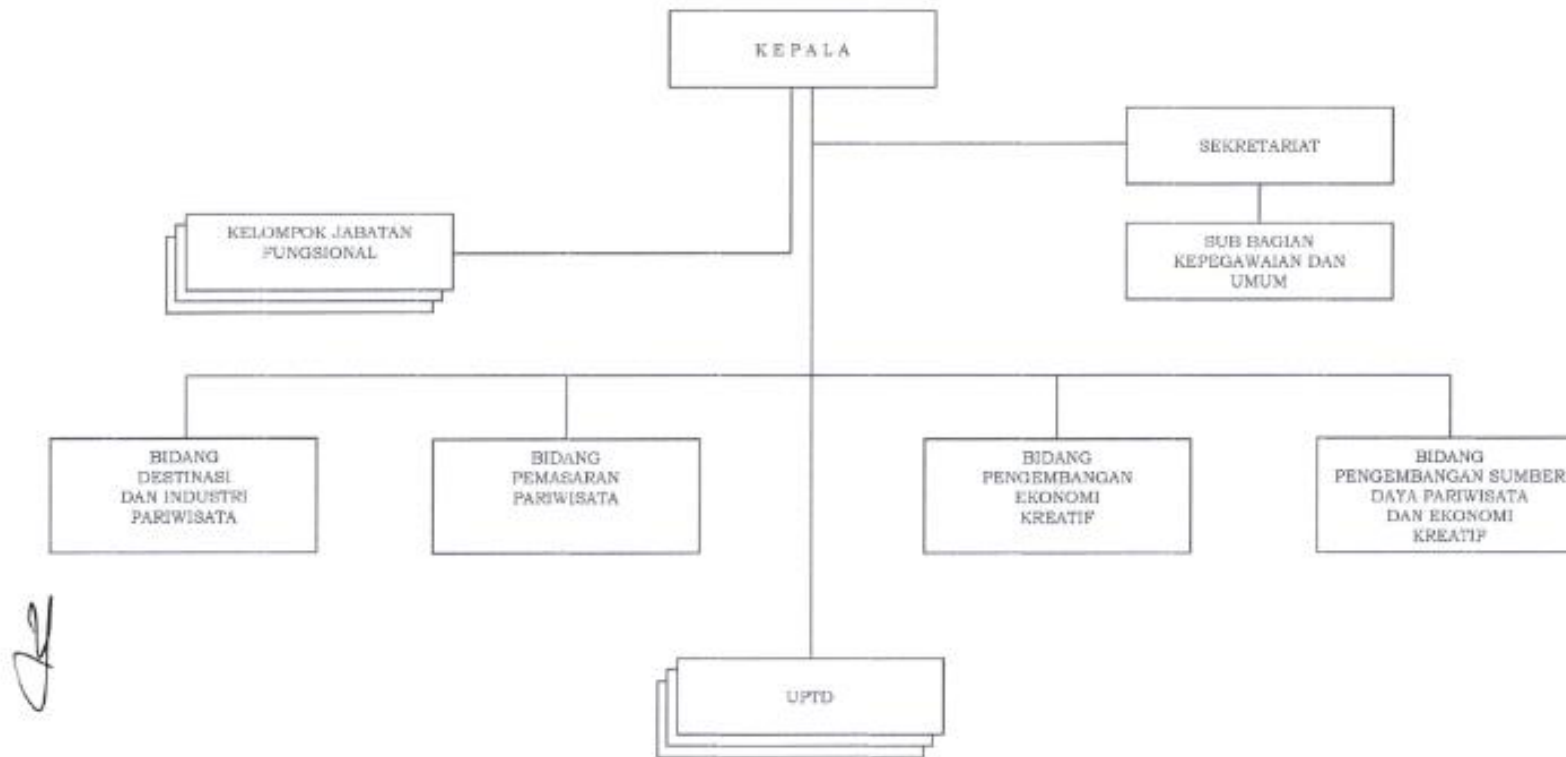
Selain Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat pegawai honorer/tenaga kontrak yang berjumlah 31 orang, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 9 Komposisi Tenaga Kontrak (TK) 31 Desember 2023

No	Jabatan Tenaga Kontrak	L	P	Jumlah	Ket
1	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18	13	31	100 %

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
 Sesuai Pergub NTT Nomor 88 Tahun 2023

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 88 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 Desember 2023



4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, antisipatif, realistis untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya RKT ini juga merupakan jembatan antara Renstra Dinas Parekraf NTT 2024-2026.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan RKT ini adalah sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RKT ini adalah sebagai bahan monitoring, evaluasi dan updating kinerja yang akan dipertanggungjawabkan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (good governance) sesuai tugas dan kewenangannya.

5. Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 memuat informasi tentang upaya pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang tergambar dalam tujuan, sasaran, kebijakan umum anggaran, strategi, prioritas, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainnya untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dan Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Tahap keempat dan isu strategis actual.

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global
3. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, social budaya, politik dan keamanan
5. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan
6. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat
7. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis Provinsi NTT dalam RPD NTT 2024 – 2026

1. Pertumbuhan dan Pemerataan pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial
4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT
6. Reformasi Birokrasi
7. Dampak Covid 19
8. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024

2.3. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan RPJPD NTT tahapan ke-4 secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia NTT yang maju, mandiri adil dan makmur dicapai melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing didukung oleh SDM berkualitas. Rumusan Tujuan dan Sasaran dalam RPD NTT 2024 – 2026 yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif beserta indikator pencapaiannya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 10 Rumusan Tujuan dan Sasaran RPD NTT 2024 – 2026 yagn terkait Pembangunan Kepariwisata dan Ekraf

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2021	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	Pertumbuhan PDRB (%)	2,51	3,1	4,55-5,35	4,75-5,65	5.15-6,01
	2. Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	Kontribusi pariwisata pada PDRB (%)	6,46	7,59	7,77	7,79	7,79
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	70.538,34	80.758,35	85.119,30	89.715,74	89.715,74
	3. Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan	Realisasi Nilai investasi (Rp. Triliun)	5,1	5,3	5,7	6,2	17,2
		Neraca perdagangan (Rp Triliun)	-33,88	-26,78	-27,64	-23,05	-23.05
	4. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,77	2,66 – 3,37	2,51-2,35	2,25-2,05	2,25-2,05
	5. Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.554	7.598	7.762	7.954	7.954
		Inflasi	2,91	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1
	6. Menurunnya kemiskinan masyarakat	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20,99	20-19,63	19,35-18,85	18,50-17,03	18,50-17,03
	7. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	ndeks Gini (Poin)	0,339	0,336-0,338	0,337-0,335	0,332-0,330	0,332-0,330
	8. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	23,15	24,71	25,8	26,85	26,85
	9. Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Gender (%)	92,63	93	94	94,56	94,56
	10. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	67,9	68	68,25	68,5	68,5

Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Dalam Renstra Dinas Parekraf NTT 2024 - 2206

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2021	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kuantitas promosi pariwisata (jumlah kegiatan promosi)	n/a	14 kegiatan promosi	14 kegiatan promosi	16 kegiatan promosi	44 kegiatan promosi
		2. Meningkatnya jumlah produk ekraf yang dipasarkan berbasis digital (jumlah produk)	n/a	100 produk	100 produk	100 produk	300 produk
		3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (orang bersertifikat)	96 orang	40 orang	40 orang	40 orang	120 orang
		4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif (orang bersertifikat)	n/a	40 orang	40 orang	40 orang	120 orang
		5. Meningkatnya kualitas destinasi wisata (jumlah lokasi DTW)	14 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	3 Destinasi	14 Destinasi
		6. Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI (jumlah fasilitasi HKI)	165 HKI	100 HKI	100 HKI	100 HKI	465 HKI

2.4. Strategi dan Arah kebijakan

Tujuan RPD	Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial				
Sasaran RPD	Meningkatnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung perekonomian				
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan			
		Strategi	2024	2025	2026
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas promosi daya tarik wisata dan kualitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif	Meningkatnya kuantitas promosi pariwisata (jumlah kegiatan promosi)	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		Meningkatnya jumlah produk	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana

		ekraf yang dipasarkan berbasis digital (jumlah produk)	Kota Kreatif	Kota Kreatif	Kota Kreatif
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (orang bersertifikat)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif (orang bersertifikat)	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya kualitas destinasi wisata (jumlah lokasi DTW)	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI (jumlah fasilitasi HKI)	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

2.5. Program dan Kegiatan

Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Parekraf NTT 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2022)	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Promosi Daya Tarik Wisata dan Kualitas SDM Pariwisata serta Ekonomi Kreatif							
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	01. Persentase destinasi yang ditangani/dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	24 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	3 Destinasi	5 Destinasi

		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	NA %	4.17 %	4.17 %	12.50 %	20.84 %
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	NA Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Melalui OSS	44 Rekomendasi	100% Rekomendasi	100% Rekomendasi	100% Rekomendasi	100% Rekomendasi
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	0 %	31.82 %	31.82 %	36.36 %	100 %
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW yang Dipromosikan	NA DTW	14 DTW	14 DTW	16 DTW	44 DTW
		<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>NA Dokumen</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	0 %	33.33 %	33.33 %	33.33 %	100 %
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	165 Dokumen HKI	100 Dokumen HKI	100 Dokumen HKI	100 Dokumen HKI	465 Dokumen HKI
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	0 %	33.33 %	33.33 %	33.33 %	100 %
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital	NA Produk Ekraf	100 Produk Ekraf	100 Produk Ekraf	100 Produk Ekraf	300 Produk Ekraf
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	0 %	33.33 %	33.33 %	33.33 %	100 %

		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	96 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	216 Orang
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	02. Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	0 %	33.33 %	33.33 %	33.33 %	100 %
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	NA Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	120 Orang

Secara lengkap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kerangka pendanaan selama 3 tahun dapat dilihat pada lampiran 1.

2.6. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja Dalam Renstra Dinas Parekraf NTT 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 13. Indikator Kinerja Dinas Parekraf NTT 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Uraian dan Formula	Target			Kondisi Akhir (2026)
				2024	2025	2026	
1	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6,41 %	<p>Asumsi yang dipakai untuk menghitung Kontribusi PDRB sektor Pariwisata diperoleh dari komponen sektor akomodasi, makan-minum (a), transportasi (b) dan sector jasa lainnya (c) terhadap PDRB Harga konstan.</p> <p>Formula : Kontribusi pariwisata (K) dihitung dari Jumlah kontribusi dari 3 komponen pembentuk PDRB yang diasumsikan dibagi Total PDRB tahun bersangkutan dan dikalikan 100 %.</p> <p>$K = (a+b+c) / \text{Total PDRB} \times 100\%$</p>	7,59	7,77	7,79	7,79 %
2.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp Juta)	70.538	<p>Asumsi yang dipakai untuk menghitung nilai tambah Ekraf diperoleh dari komponen PDRB omset pemasaran jenis usaha makan minum (a), dan industri pengolahan yang meliputi industry pengolahan makanan dan minuman (b), industri pengolahan lainnya (c) dan industri tekstil dan pakaian jadi (d)</p> <p>Formula: Nilai Tambah Ekraf (N) dihitung dari Jumlah kontribusi dari usaha makan-minum dan usaha industri pengolahan (makanan dan minuman, industry tekstil dan pakaian jadi, industry pengeolahan lainnya) setelah dikalikan dengan koefisien</p>	80.758,35	85.119,30	89.715,74	89.715,74

			(dalam bentuk persentase) pembentuk nilai tambah dari masing-masing usaha. Koefisien ini diperoleh dari hasil perhitungan BPS NTT. $N=(a \times 15 \%) + (b \times 75\%) + (c \times 100 \%) + (d \times 90 \%)$				
3.	Lama tinggal Wisatawan (Hari)	2	Jumlah alokasi waktu yang dipakai wisatawan dari saat tiba dan meninggalkan tempat tujuan berwisata. Asumsi menghitung lama tinggal dipakai data rata-rata lama tinggal wisatawan menginap di suatu daerah berdasarkan lama tinggal pada fasilitas akomodasi. Data yang dipakai adalah data publikasi dari BPS.	2	2,5	2,6	2,6
4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata dalam provinsi NTT dalam satu tahun. Data diperoleh dari hasil perhitungan oleh Kabupaten/kota.	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144

3. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

3.1. Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran APBD tahun 2024 berjumlah Rp 10. 565.764.160 dengan 5 (lima) program dan kegiatan serta rencana penerimaan / pendapatan dari aset yang dikelola seperti tergambar dalam tabel – tabel berikut.

Tabel.14. Anggaran Belanja APBD TA 2024

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Lokasi	Uraian Keluaran Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.845.764.160		Penyusunan dokumen perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.962.000		
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.010.000	Kota Kupang	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.423.856.000		Penyediaan gaji, tata usaha dan pengelolaan keuangan, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, dokumen pemeriksaan.
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.372.216.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.640.000	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	Kota Kupang	
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000		Data kepegawaian dan system informasi kepegawaian
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	Kota Kupang	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.398.000		Penyediaan material dan barang kantor, makan-minum tamu, konsultasi koordinasi SKPD dan kabupaten/kota
	▪ Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	Kota Kupang	
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.398.000	Jakarta, Jabar	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.548.160		komunikasi, listrik, air kantor, pelayanan umum kantor
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.093.548.160	Kota Kupang	
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	38.000.000		Jasa pemeliharaan

	Urusan Pemerintahan Daerah			kendaraan, mesin dan bangunan lainnya
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.000.000	Kota Kupang	
	▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	Kota Kupang	
2	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	0		
3.	Program Pemasaran Pariwisata	95.000.000		
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	95.000.000		
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	70.500.000	Kota Kupang, TTS, TTU	Video CoE
	▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	24.500.000	Kota Kupang	Festival Kota Kupang
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	125.000.000		
	a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	75.000.000		
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	75.000.000	Kab. Belu, TTS, Malaka	Fasilitasi HKI,
	b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	50.000.000		
	▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	50.000.000	Kota Kupang	Penyusunan RAD dan Pembentukan Gugus Tugas
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.500.000.000		
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	829.399.000		
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	829.399.000	Kota Kupang, Belu, Manggarai, Sikka	Sertifikasi pekerja sektor restoran 140 orang (Belu 50, Manggarai 40, Kupang) 50 dan Sektor akomodasi 100 orang (Sikka 50, Kupang 50)
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	670.601.000		
	▪ Pelatihan, Bimbingan Teknis dan PEndampingan Ekonomi Kreatif	670.601.000	Kota Kupang, Matim, Sumba Timur,	Sertifikasi kompetensi tenaga Barista 30 orang (Matim) , Bimtek Ekraf Desa wisata (Kupang, Sumba Timur), Workshop Seni Pertunjukkan (Sabu, Matim, Sikka)
	Jumlah	10.565.764.160		

Sumber: DPA Disparekraf NTT 2024

Tabel. 15. Rencana Pendapatan Tahun 2024

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET 2024	KETERANGAN
A	Retribusi Daerah	300.000.000	
1.	Retribusi Pemakaian/Penyewaan Kekayaan Daerah		
	a. Sewa Rumah Dinas (7 unit)		
	b. Sewa Kantin Pariwisata		
	c. Sewa Pusat Kuliner dan Cenderamata		
	d. Fasilitas Pariwisata Estate		
	e. Sewa Rumah Ekraf Victory		
	f. Sewa Lopo		
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
	a. Kawasan Wisata Kampung Seni Flobamorata (Gua Monyet)		
	b. Kawasan Pantai Lasiana		
B	Lain – Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	
	Rekapitulasi	2.300.000.000	

Sumber: DPA Disparekraf NTT 2024

Untuk alokasi DIPA Tugas Pembantuan (APBN) tahun 2024 berjumlah Rp 1.835.000.000 dengan 2 (dua) program dan kegiatan seperti tergambar dalam tabel berikut

Tabel.16 . Anggaran Belanja APBN TA 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Uraian
1.	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	a. Pengembangan sumber daya manusia Pariwisata	200.000.000	Pelatihan Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan (target 30 orang pramuwisata)
	b. Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	200.000.000	Pelatihan / workshop Bidang Ekonomi Kreatif (50 orang peserta)
	c. Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000	Koordinasi untuk data SISPARNAS dari 22 kab/kota
	d. Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (event)	500.000.000	Konfrensi dan event (target 3 event)
	e. Pengembangan Industri Kuliner, Kriya,Desain dan Fashion	205.000.000	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat/ Bimtek Proposal Bisnis bagi pelaku Ekraf (30 orang)
2.	Program Dukungan Manajemen		
	a. Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	130.000.000	Perencanaan, koordinasi, laporan pertanggungjawaban,
	Total	1.835.000.000	

Sumber: Kemenparekraf RI, 2024

3.2. Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator / Target Program	Indikator Target Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB 6,41 %	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 100 %		Bidang Destinasi Pariwisata	APBD
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (1 destinasi wisata)		
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi (2 dokumen)		
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Rekomendasi Melalui OSS (100 %)		
		Program Kepariwisataan dan Ekraf /Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata		Dat Sisparnas 22 kab/kota	Bidang Destinasi Pariwisata	APBN TP
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan sebesar 31,82 % (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per)		Bidang Pemasaran Pariwisata	APBD
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan		Jumlah DTW yang Dipromosikan sebanyak 14 DTW		APBD

		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (2 dokumen)		APBD
		Program Kepariwisata dan Ekraf /			Bidang Pemasaran Pariwisata	APBN TP
		Pengembangan Penyelenggaraan Event		Target 3 event		
		Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion		30 orang pelaku Ekraf		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi. (33,33 %)		Bidang Kelembagaan Parekraf	APBD
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata sebanyak 40 orang		APBD
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 40 orang		APBD
		Program Kepariwisata dan Ekraf / Pengembangan SDM Pariwisata		Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata sebanyak 30 orang (Pramuwisata)		APBN TP
	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Rp 70,53 Juta	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)		Bidang Industri Parekraf	APBD

		Hak Kekayaan Intelektual	(33,33%)			
			Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital (33,33 %)			
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (100 dokumen)		APBD
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital. 100 produk ekraf		APBD
		Program Kepariwisataaan dan Ekraf			Bidang Industri Parekraf	APBN TP
		Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif		50 orang pelaku Ekraf		
		Pengembangan Industri Kuliner, Kriya,Desain dan Fashion		30 orang pelaku ekraf		

4. PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan komitmen Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.



Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 beserta target indikator yang akan dicapai.

Kupang, Maret 2024

Dit. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Joni Lie Rohi Lodo, S.H
Pemimpin Tk. I / IV b
NIP. 196707171993031016

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Parekraf	
Fungsional Perencana Ahli Madya	

Referensi:

1. RPD NTT 2024 – 2026.
2. Renstra Dinas Parekraf Provinsi NTT 2024-2026.
3. DPA SKPD Dinas Parekraf NTT 2024
4. DIPA Tugap Pembantuan TA 2024

Lampiran

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
PK
Rencana Aksi

TAHUN 2024[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]